

**ANALISIS BEBAN KERJA DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN KEAGAMAAN
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM PNS PADA KUA KECAMATAN
TAMANSARI**

Aisyah Najwa Sholiha¹, Nasywa Atsil Mufidah Ramadhani², Reyfa Adreyna
Mutiaranisa³, Khairunnisa Dahlan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Aisyah binti Abu Bakar Bogor
1aisyahnajwaa04@gmail.com, 2nasywaatsil131103@gmail.com,
3reyfaadreyna05@gmail.com, 4khairunnisa.dahlan01@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Religious Counselors who serve as civil servants (PNS) at the Office of Religious Affairs (KUA) play an important role in providing religious guidance and counseling to the community. However, the limited number of counselors often results in a high workload, which may affect the effectiveness of religious counseling services. This study aims to analyze the workload of Islamic Religious Counselors and the effectiveness of religious counseling programs at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tamansari District. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic Religious Counselors at KUA Tamansari District experience a heavy workload as they are responsible for various duties, including Marriage Guidance (Bimbingan Perkawinan/BIMWIN), fostering Islamic study groups (majelis taklim), providing religious counseling to diverse community groups, coordinating with cross-sectoral stakeholders, and completing administrative and reporting tasks. Nevertheless, the implementation of religious counseling has generally been effective, as reflected in the consistent implementation of counseling programs, the counselors' ability to adapt the materials to community needs, and the establishment of collaboration with various stakeholders. Supporting factors include the counselors' commitment, the existence of permanent target groups, and support from the Ministry of Religious Affairs, while the main obstacles include the limited number of counselors, the extensive coverage area, inadequate facilities and infrastructure, and substantial administrative demands. Therefore, increasing the number of counselors and improving supporting facilities and infrastructure are necessary to further enhance the effectiveness of religious counseling services.

Keywords: *workload, Islamic Religious Counselors, Office of Religious Affairs*

ABSTRAK

Penyuluh Agama Islam PNS di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah penyuluh sering kali menyebabkan tingginya beban kerja yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja Penyuluh Agama Islam PNS serta efektivitas penyuluhan keagamaan di KUA Kecamatan Tamansari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam PNS di KUA Kecamatan Tamansari memiliki beban kerja yang tinggi karena harus melaksanakan berbagai tugas, seperti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), pembinaan majelis taklim, penyuluhan kepada berbagai kelompok masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta administrasi dan pelaporan. Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan keagamaan secara umum telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan terlaksananya program pembinaan secara rutin, kemampuan penyuluh menyesuaikan materi dengan kebutuhan masyarakat, serta terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak. Faktor pendukung meliputi komitmen penyuluh, keberadaan kelompok binaan tetap, dan dukungan program Kementerian Agama, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, luasnya wilayah binaan, keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya tuntutan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah penyuluh dan peningkatan dukungan sarana prasarana agar efektivitas penyuluhan keagamaan dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: beban kerja, penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki peran strategis dalam pelayanan keagamaan masyarakat, tidak hanya menjalankan fungsi administratif seperti pencatatan nikah, tetapi juga membina kehidupan beragama masyarakat melalui program bimbingan dan penyuluhan. Dalam struktur ini, penyuluh agama Islam menjadi ujung tombak pembinaan keagamaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan di majelis taklim, sekolah, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kondisi di

lapangan menunjukkan bahwa beban kerja penyuluh agama bukan persoalan baru—media telah lama merekam keluhan penyuluh mengenai beratnya tugas yang mereka emban dibandingkan honor dan fasilitas yang diterima, dan pemerintah pun turut merespons melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berbasis beban kerja.

Sejumlah fakta di lapangan memperkuat gambaran tersebut. Seorang penyuluh dituntut menjalankan bimbingan perkawinan secara rutin, penyuluhan kepada

berbagai kelompok binaan, serta penguasaan materi yang sangat luas—mulai dari moderasi beragama, kesehatan, wakaf, zakat, hingga isu aktual seperti bahaya terorisme dan vaksinasi—di samping tuntutan tertib administrasi yang terus berkembang.

Penelitian terdahulu pun banyak menyoroti persoalan serupa: Dwiyono dan Hapsari menemukan bahwa peran penyuluh belum berjalan seideal tugas pokoknya akibat banyaknya tugas yang diemban (Dwiyono & Hapsari, 2018), sementara Noorbani menemukan bahwa sebagian besar wilayah di Sumatera Barat masih kekurangan tenaga penyuluh dibandingkan kebutuhan idealnya (Noorbani, 2017). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengangkat pengalaman beban kerja penyuluh di tingkat KUA kecamatan, sekaligus mengaitkannya dengan efektivitas penyuluhan, masih sangat terbatas.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini berfokus pada beban kerja Penyuluh Agama Islam PNS di KUA Kecamatan Tamansari, yang dipilih karena hanya memiliki tiga penyuluh untuk melayani seluruh kecamatan, jauh lebih sedikit

dibandingkan kecamatan tetangga (Pamijahan) yang memiliki delapan hingga sembilan penyuluh untuk cakupan wilayah yang relatif sebanding. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beban kerja Penyuluh Agama Islam PNS serta menganalisis efektivitas pelaksanaan penyuluhan keagamaan di KUA Kecamatan Tamansari.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi beban kerja, efektivitas pelaksanaan penyuluhan keagamaan, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam PNS. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari serta wilayah kelompok binaan setempat. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang Penyuluh Agama Islam PNS, Kepala KUA, dan satu orang anggota staf bagian administrasi KUA Kecamatan Tamansari sebagai informan utama, serta perwakilan peserta penyuluhan sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu

wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan untuk menggali aspek operasional, tata kelola administrasi, dan kendala lapangan, observasi langsung pada kegiatan penyuluhan seperti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dan Majelis Taklim, serta studi dokumentasi berupa foto kegiatan, jadwal pelaksanaan penyuluhan, dan arsip internal KUA. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data secara deskriptif-naratif, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan tugas keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari didukung oleh tiga orang Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang tanggung jawab atas wilayah binaan di tingkat kelurahan. Para penyuluh mengemban beban kerja ganda yang mencakup ranah operasional lapangan—seperti Bimbingan

Perkawinan (BIMWIN), pengajian Majelis Taklim, syiar keagamaan di masjid, serta pembinaan pada lembaga pendidikan—sekaligus pemenuhan kewajiban administratif pelaporan kepada Kementerian Agama. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia tersebut menuntut penyuluh untuk melakukan pengelolaan jadwal secara mandiri guna menjamin keterjangkauan seluruh area binaan.

Tingkat efektivitas penyuluhan menunjukkan dinamika yang bervariasi antarprogram. Pada program BIMWIN, partisipasi peserta tergolong tinggi akibat kedudukannya sebagai prasyarat administratif pernikahan, kendati motivasi sebagian peserta masih terbatas pada pemenuhan formalitas. Kondisi tersebut diantisipasi melalui penerapan pendekatan persuasif-interaktif selama proses bimbingan. Adapun mekanisme evaluasi program diukur secara kualitatif melalui observasi keaktifan dan diskusi interaktif, sementara instrumen tes terstandar (*pre-test* dan *post-test*) belum dapat diimplementasikan secara optimal akibat ketidakseragaman waktu kehadiran

peserta. Kendala operasional utama bersumber dari keterbatasan personel serta sarana prasarana, sedangkan faktor pendorong keberhasilan kegiatan didominasi oleh efektivitas koordinasi awal dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Secara umum, pelaksanaan program penyuluhan keagamaan oleh Penyuluh Agama Islam PNS di KUA Kecamatan Tamansari telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dalam pelaksanaannya, program penyuluhan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui program pembinaan yang beragam. Efektivitas program penyuluhan tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari tercapainya tujuan penyuluhan itu sendiri, yaitu meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Keberhasilan program penyuluhan terlihat dari konsistensi penyelenggaraan kelompok binaan tetap, seperti majelis taklim dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Program BIMWIN membekali para calon pengantin mengenai pembentukan keluarga *sakinah*,

mawaddah, wa rahmah, sekaligus mengevaluasi kemampuan membaca Al-Qur'an. Di sisi lain, majelis taklim berperan strategis sebagai media diskusi keagamaan yang berkesinambungan kepada masyarakat, khususnya kelompok usia dewasa dan lanjut usia.

Selain kegiatan rutin, fleksibilitas penyuluh keagamaan terlihat dari kemampuan mereka dalam mengadaptasi materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Materi yang disampaikan tidak terbatas pada fiqih ibadah, tetapi juga menyentuh isu-isu aktual dan kontemporer seperti moderasi beragama, sertifikasi halal, zakat, wakaf, haji dan umrah, pencegahan HIV/AIDS, bahaya terorisme, hingga edukasi kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Variasi penyuluhan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh memiliki kapasitas yang cukup tinggi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan persoalan sosial yang relevan dan sedang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas penyuluhan belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan jumlah

penyuluh menyebabkan cakupan pelayanan menjadi kurang maksimal apabila dibandingkan dengan luas wilayah binaan dan banyaknya kelompok masyarakat yang harus dilayani. Selain itu, penyuluh juga harus membagi waktu antara kegiatan lapangan, administrasi, koordinasi lintas sektor, serta penyusunan laporan sehingga intensitas pembinaan pada beberapa kelompok binaan belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan masih perlu ditingkatkan melalui penambahan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana yang lebih memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penyuluhan keagamaan di KUA Kecamatan Tamansari. Kerja sama yang baik antara penyuluh dengan berbagai pihak, seperti kepala desa, ustaz dan ustazah setempat, tokoh masyarakat, serta instansi lain seperti puskesmas memudahkan penyuluh dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta meningkatkan kredibilitas materi yang disampaikan. Selain itu, keberadaan kelompok binaan tetap dengan jadwal rutin yang

terstruktur, seperti majelis taklim dan peserta Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), memudahkan penyuluh dalam melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan. Kementerian Agama juga memberikan dukungan kebijakan berupa program-program prioritas memberikan arah yang jelas bagi penyuluh dalam menentukan materi penyuluhan sesuai kebutuhan masyarakat. Terakhir, komitmen dan dedikasi para penyuluh menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh memandang tugasnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sehingga tetap menjalankan tugas secara maksimal meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan keagamaan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah penyuluh. Dengan hanya tiga orang penyuluh yang bertugas untuk satu kecamatan, beban kerja menjadi cukup tinggi karena harus menangani berbagai kelompok sasaran sekaligus

melaksanakan tugas administrasi. Selanjutnya, luasnya wilayah binaan menyebabkan mobilitas penyuluh cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada pembagian waktu antara kegiatan penyuluhan di lapangan dengan pekerjaan administratif di kantor. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pada beberapa lokasi penyuluhan juga menjadi salah satu hambatan. Tidak tersedianya papan tulis maupun ruang yang memadai menyebabkan metode penyuluhan kurang bervariasi dan lebih banyak menggunakan metode ceramah. Selain itu, luasnya materi yang harus dikuasai penyuluh menjadi tantangan tersendiri. Penyuluh dituntut mampu menyampaikan berbagai materi, mulai dari fiqih, keluarga sakinah, zakat, wakaf, produk halal, hingga isu-isu sosial dan kesehatan sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Terakhir, sistem administrasi yang sedang beralih menuju digitalisasi memerlukan proses penyesuaian sehingga pada masa transisi masih memerlukan adaptasi dari para penyuluh.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan

tersebut, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Tamansari melakukan beberapa upaya. Salah satu di antaranya dengan menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah desa, tokoh agama, pengurus majelis taklim, maupun instansi terkait sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penyuluh juga perlu melakukan penyesuaian metode penyuluhan sesuai kondisi lapangan. Ketika fasilitas pembelajaran terbatas, penyuluh memanfaatkan metode ceramah, diskusi, maupun tanya jawab agar materi tetap dapat dipahami oleh peserta. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi administrasi melalui penerapan sistem digital dan *paperless* sehingga penyusunan laporan menjadi lebih praktis dibandingkan sistem manual sebelumnya. Penyuluh juga dianjurkan dapat melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri dengan terus memperbarui pengetahuan terhadap materi-materi baru yang menjadi kebijakan Kementerian Agama maupun isu-isu aktual di masyarakat. Terakhir,

dianjurkan untuk menyusun prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga keterbatasan jumlah penyuluh tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada kelompok binaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam PNS di KUA Kecamatan Tamansari memiliki beban kerja yang cukup tinggi karena harus melaksanakan berbagai tugas secara bersamaan, meliputi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), pembinaan majelis taklim, penyuluhan pada kelompok binaan insidental, koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian administrasi dan pelaporan. Beban kerja tersebut belum proporsional dengan jumlah penyuluh yang hanya terdiri atas tiga orang untuk melayani seluruh wilayah Kecamatan Tamansari.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan keagamaan secara umum telah berjalan cukup efektif. Program-program pembinaan terlaksana secara rutin, materi yang

disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan Kementerian Agama, serta memperoleh respons yang baik dari kelompok binaan. Efektivitas tersebut didukung oleh adanya kerja sama lintas sektor, keberadaan kelompok binaan tetap, dukungan program pemerintah, serta dedikasi para penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya cakupan materi penyuluhan, serta tingginya tuntutan administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyuluh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, menyesuaikan metode penyuluhan dengan kondisi lapangan, memanfaatkan sistem administrasi digital, meningkatkan kompetensi, serta menyusun skala prioritas kegiatan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Kementerian Agama mempertimbangkan penambahan jumlah Penyuluh Agama Islam PNS sesuai dengan kebutuhan wilayah kerja sehingga beban kerja dapat lebih proporsional dan pelayanan

kepada masyarakat semakin optimal. Selain itu, KUA Kecamatan Tamansari diharapkan terus meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyuluhan serta mengoptimalkan sistem administrasi berbasis digital dan kerja sama lintas sektor. Para penyuluh juga diharapkan senantiasa meningkatkan kompetensi profesional agar mampu menyesuaikan materi penyuluhan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai beban kerja dan efektivitas penyuluhan keagamaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan penelitian yang lebih beragam sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel in Press:

Fajar, R., & Muhyidin. (2019, Januari Ahad). *Beratnya Beban Kerja Penyuluh Agama*. From Republika: <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/20/plm6q3313-beratnya-beban-kerja-penyuluh-agama>

Farida, I. (2019, Januari 20). *Beratnya Beban Kerja Penyuluh Agama*.

From REPUBLIKA.CO.ID: <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/20/plm6q3313-beratnya-beban-kerja-penyuluh-agama>

N, S. (n.d.). *Penyuluh Agama*. From netisulistiani.wordpress.com: <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>

Jurnal:

Dwiyono, H., & Hapsari, T. B. (2018). Optimalisasi Peran Penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 503-519.

Noorbani, M. A. (2017). Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan di Sumatera Barat. *Jurnal Bimas Islam*, 1-34.

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77-84. From <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93/20>

Skripsi:

Lesta. (2021). PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MELAKUKAN TRAUMA

HEALING SETELAH BANJIR
BANDANG DI DESA RADDA
KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA.
From Repository UIN Sunan
Kalijaga:
[https://repository.uinpalopo.ac.
id/id/eprint/5716/1/LESTA.pdf](https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/5716/1/LESTA.pdf)